

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA PERIODE TAHUN 2021
(Studi Pada Pencari Kerja, Pekerja Dan Pekerja Yang Terkena PHK Di
Kota Bandar Lampung)**

(Tesis)

**Oleh
RYDHO FEBRI RAMADHAN
NPM. 2026061009**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA PERIODE TAHUN 2021
(Studi Pada Pencari Kerja, Pekerja Dan Pekerja Yang Terkena PHK Di
Kota Bandar Lampung)**

**Oleh
RYDHO FEBRI RAMADHAN**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ADMINISTRASI**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA PERIODE TAHUN 2021 (Studi Pada Pencari Kerja, Pekerja Dan Pekerja Yang Terkena PHK Di Kota Bandar Lampung)

Oleh
Rydho Febri Ramadhan

Studi dilatarbelakangi dari masalah mendasar yang dihadapi di Indonesia yaitu pengangguran. Sebagai akibat dari kurangnya pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan sehingga tenaga kerja yang ada tidak terserap secara penuh yang mengakibatkan jumlah pengangguran meningkat. Masalah pengangguran dan ketenagakerjaan tersebut juga diperparah dengan hadirnya Covid-19 yang melanda Indonesia. Mewujudkan perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas dan daya saing bagi angkatan kerja maka, diperlukan memberikan pengembangan kompetensi kerja yang diwujudkan dalam program pemerintahan. Salah satu program yang dikeluarkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja dalam rangka perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, dan daya saing bagi angkatan kerja. Studi merumuskan permasalahan mengenai efektivitas Kartu Prakerja periode tahun 2021 pada pencari kerja, pekerja dan pekerja yang terdampak PHK di Kota Bandar Lampung dalam perumusan kebijakan publik. Tujuan penelitian mengetahui efektivitas kebijakan Kartu Prakerja periode tahun 2021 pada pencari kerja, pekerja, dan pekerja yang terdampak PHK di Kota Bandar Lampung. menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan proses pelaksanaan kebijakan program Prakerja untuk mendapatkan dan terdaftar program pra kerja belum bisa dikatakan baik dan sempurna. Selain hal tersebut program kartu Prakerja belum dapat dikatakan belum efektif, terlepas dari besarnya anggaran yang telah disediakan pemerintah, pencapaian tujuan program yang belum maksimal dan ketetapan sasaran proram yang belum tepat serta terdapat beberapa aspek yang menjadi catatan dalam pelaksanaan program kartu Prakerja adalah Peserta tidak diarahkan ke industri unggulan, program Prakerja juga secara signifikan tidak memberikan informasi kepada peserta mengenai keahlian apa yang dibutuhkan oleh industri potensial. Namun, walau demikian program kertu prakerja masih tetap berjalan hingga tahun 2023 dan akan terus berlanjut sampai tahun 2024. Hal tersebut mengingat pada dasarnya Kartu Prakerja tercantum dalam Perpes, selama peraturan tersebut belum dicabut, maka program tersebut masih akan berlaku.

Kata Kunci : Efektivitas, Program Kartu Prakerja, Pencari Kerja, Pekerja, Pekerja PHK

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF THE PRE-EMPLOYMENT CARD POLICY FOR THE 2021 PERIOD

**(Study of Job Seekers, Workers and Workers Affected by Layoffs in Bandar
Lampung City)**

By

Rydho Febri Ramadhan

The study was motivated by the fundamental problem faced in Indonesia, namely unemployment. As a result of the government's lack of providing employment opportunities, the existing workforce is not fully absorbed, resulting in the number of unemployed increasing. The problem of unemployment and employment was also exacerbated by the presence of Covid-19 which hit Indonesia. To realize the expansion of employment opportunities, increase productivity and competitiveness for the workforce, it is necessary to provide work competency development which is realized in government programs. One of the programs issued by the government is through Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 36 of 2020 concerning Development of Work Competencies through the Pre-Employment Card Program in the context of expanding employment opportunities, increasing productivity and competitiveness for the workforce. The study formulates problems regarding the effectiveness of the Pre-Employment Card for the 2021 period for job seekers, workers and workers affected by layoffs in Bandar Lampung City in the formulation of public policy. The aim of the research is to determine the effectiveness of the Pre-Employment Card policy for the 2021 period on job seekers, workers and workers affected by layoffs in Bandar Lampung City. using descriptive analysis methods. The research results show that the process of implementing the pre-employment program policy to obtain and register for the pre-employment program cannot be said to be good and perfect. Apart from this, the Pre-Employment card program cannot be said to be effective, apart from the large budget provided by the government, the achievement of program objectives has not been maximized and the determination of program targets has not been precise and there are several aspects to note in the implementation of the Pre-Employment card program, namely that participants are not directed. to leading industries, the Pre-Employment program also significantly does not provide information to participants regarding what skills are needed by potential industries. However, despite this, the pre-employment card program is still running until 2023 and will continue until 2024. This is because basically the Pre-Employment Card is stated in the Perpes, as long as this regulation has not been revoked, the program will still be valid.

**Keywords: Effectiveness, Pre-Employment Card Program, Job Seekers,
Workers, Layoff Workers**

Judul Tesis : **EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA PERIODE TAHUN 2021 (Studi Pad a Pencari Kerja, Pekerja Dan Pekerja Yang Terkena PHK Di Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Rydho Febri Ramadhan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2026061009**

Program Studi : **Administrasi Negara**

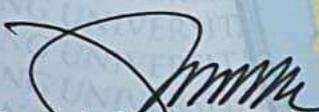
Fakultas : **Pascasarjana Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**

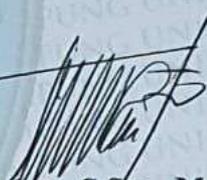
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

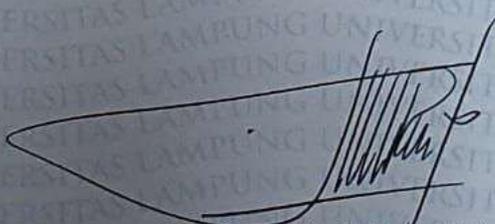
Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si
NIP. 19690226 199903 1 001


Dr. Suripto, S.Sos., M.A.B.
NIP. 19750720 200312 1 002

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Lampung


Dr. Suripto, S.Sos., M.A.B.
NIP. 19690226 199903 1 001

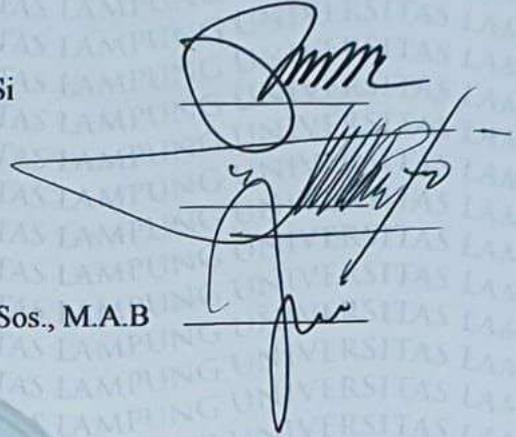
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si

Sekretaris : Dr. Suripto, S.sos., M.A.B

Penguji Utama : Dr. Maulana Agung Pratama, S.Sos., M.A.B



2. Dekan Fakultas Pasca Sarjana Universitas Lampung



Dr. Ida Nurhaida, M.Si
NIP. 196108071987032001

3. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murnadi, M.Si
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **18 Januari 2024**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: **"EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA PERIODE TAHUN 2021 (Studi Pada Pencari Kerja, Pekerja Dan Pekerja Yang Terkena PHK Di Kota Bandar Lampung)"** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Januari 2024
saya buat pernyataan,



RYDHO FEBRI RAMADHAN
NPM 2026061009

RIWAYAT HIDUP

Penulis Rydho Febri Ramadhan di lahirkan pada tanggal 08 Februari 1997 di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak pertama dan satu-satunya dari Ibunda Dra. Anita Damayantie, M.H. Penulis menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 2 Palapa, Tanjung Karang Pusat. Setelah lulus dari Sekolah Dasar penulis meneruskan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 25 Bandar Lampung. Dilanjutkan dengan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA YP Unila Bandar Lampung. Selanjutnya pada tahun 2014 penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosiologi dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara di Universitas Lampung.

Pada tahun 2020 Penulis melanjutkan pendidikan Strata 2 pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi di Universitas Lampung. Selanjutnya penulis melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Kebijakan Kartu Prakerja Periode Tahun 2021 (Studi Pada Pencari Kerja, Pekerja Dan Pekerja Yang Terkena PHK Di Kota Bandar Lampung)”.

Tepat pada tanggal 12 Maret 2022 penulis melangsungkan hari pernikahan dengan sosok wanita istimewa dalam hidupnya Fitria Ramayanti, S.T dan pada tanggal 05 Desember 2022 kebahagiaan menjadi lengkap sebab dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik dan juga menggemaskan bernama Aya Sofia Adzkiyara.

MOTTO

“Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia karena dengan pendidikan,
Anda dapat mengubah dunia.”

(Nelson Mandela)

“Rumah merupakan tempat terbaik untuk pulang. Cinta terbaik adalah keluarga.
Dan jika kamu punya keduanya, hidupmu penuh berkat

(Rydho Febri Ramadhan)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, dengan segenap ketulusan hati kupersembahkan Tesis ini Kepada yang selalu aku sayangi dan kubanggakan sesosok wanita yang sangat berpengaruh dalam perjalanan hidupku, **istriku** Fitria Ramayanti, S.T yang selalu menjadi *support system* terbesar dalam perjalanan hidup, tidak hanya memberikan kasih sayang penuh tiada hentinya untukku tapi juga rasa simpatik yang tak pernah usai disetiap harinya dan dengan sabar menemani hari-hariku dengan senyum dan tawamu agar aku bisa melewati pahit manis kehidupan ini.

Kepada kebanggaanku, buah hatiku tercinta Aya Sofia Adzkiyara tidak lupa aku persembahkan kepadamu karya tulis ini agar menjadi motivasi bagimu kelak dikemudian hari setelah engkau dewasa agar dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya dan menjadi kebanggaan kedua orang tuamu ini.

Kepada Ibuku yang aku sayangi Ibu Dra. Anita Damayantie, M.H yang telah membesarkanku hingga menjadi sosok pribadi manusia yang kuat dan hebat seperti sekarang, memberikan cinta dan kasih yang tiada henti hentinya dan mendidikku dengan sangat baik selama ini.

Tidak akan terlewatkan pula kepada Almamaterku tercinta yang selalu kubanggakan Universitas Lampung sebagai tempatku berproses dan belajar menjadi manusia yang lebih baik.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul **“Efektivitas Kebijakan Kartu Prakerja Periode Tahun 2021 (Studi Pada Pencari Kerja, Pekerja Dan Pekerja Yang Terkena PHK Di Kota Bandar Lampung)”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister administrasi di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah diperoleh penulis dapat membantu mempermudah proses penyusunan Tesis ini. Dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Suropto, S.Sos., M.A.B. selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Administrasi Universitas Lampung sekaligus selaku Pembimbing II atas segala kebesaran hatinya dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan, arahan, nasihat, pengetahuan, saran dan kritik selama proses penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.sos.,M.Si selaku Pembimbing I dan Ketua Penguji atas segala kebaikan dan kesediannya dalam memberikan bimbingan, arahan, nasihat, pengetahuan, saran dan kritik serta kesabaran selama proses penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Dr. Maulana Agung Pratama, S.Sos., M.AB selaku Penguji Utar atas kebaikan, kesediaan menguji, saran, kritik, nasihat serta ilmu ya diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis.
6. Seluruh dosen Magister Ilmu Administrasi Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan motivasi selama proses perkuliahan berlangsung.

7. Para sahabatku, terimakasih atas segala motivasi dan dukungan yang tidak terbatas dan selalu menjadi pendengar yang baik. Terima kasih atas suka cita yang tercipta dalam pertemanan ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam tesis ini dan masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, Januari 2024
Penulis,

Rydho Febri Ramadhan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Secara Teoritis	10
1.4.2 Bagi Pemerintah	10
1.4.3 Bagi Peneliti	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Dampak Covid-19	11
2.2 Program Kartu Prakerja	11
2.2.1 Tujuan Kartu Prakerja	13
2.2.2 Syarat Penerima Manfaat Kartu Prakerja	14
2.3 Efektivitas	14
2.3.1 Pengertian Efektivitas	14
2.3.2 Unsur-unsur Efektivitas	15
2.3.3 Indikator Efektivitas	15
2.3.4 Konsep Efektivitas Pelayanan Publik	16
2.4 Pengangguran	16
2.4.1 Pengertian Pengangguran	16
2.4.2 Jenis-Jenis Pengangguran	17
2.4.3 Dampak Pengangguran	20
2.4.4 Faktor Penyebab Pengangguran	21
2.4.5 Upaya Mengurangi Pengangguran	22

2.5 Evaluasi Kebijakan Publik	23
2.5.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	23
2.5.2 Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik.....	23
2.5.3 Tipe Evaluasi Kebijakan Publik.....	24
2.5.4 Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik.....	24
2.5.5 Tujuan Evaluasi Kebijakan Publik.....	25
2.5.6 Model Pendekatan Evaluasi Kebijakan Publik	26
2.5.7 Dimensi Evaluasi Kebijakan Publik	27
2.6 Kerangka Berfikir.....	27

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Dan Tipe Penelitian	29
3.2 Fokus Penelitian.....	29
3.3 Sumber Data.....	30
3.3.1 Data Primer	30
3.3.2 Data Sekunder	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.5 Teknik Pengolahan Data	32
3.6 Teknik Analisis Data.....	33
3.7 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Penelitian Kualitatif	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	37
4.1.1 Proses Pelaksanaan Kebijakan Kartu Prakerja.....	37
4.1.2 Efektivitas Kebijakan Kartu Prakerja.....	49
4.2 Pembahasan	59

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bandar Lampung	2
Tabel 1.2 Anggaran Dan Realisasi Program Kartu Prakerja	5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	28
Gambar 3.1 Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles dan Huberman ...	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Disnaker Kota Bandar Lampung	68
Lampiran 2. Pedoman Wawancara Penerima Manfaat Kartu Pra Kerja	69
Lampiran 3. Tabel Reduksi Data Hasil Wawancara Dengan Informan	86
Lampiran 3. Foto Dokumentasi Observasi Di Disnaker Kota Bandar Lampung .	92
Lampiran 4. Foto Dokumentasi Informan Dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung Dan Masyarakat Penerima Manfaat Program Kartu Prakerja	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai jumlah penduduk mencapai 273, 8 juta jiwa pada tahun 2021 dan jika dilihat dari lajur pertumbuhan penduduk terus bertambah setiap tahunnya (www.bps.go.id). Suatu negara berkembang dengan jumlah penduduk mencapai ratusan juta jiwa, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia pasti memiliki masalah-masalah mendasar yang dihadapi. Salah satu masalah mendasar yang dihadapi oleh Indonesia merupakan pengangguran. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan menambah jumlah angkatan kerja yang harus selaras dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Jika hal tersebut tidak dapat berimbang maka, angka atau tingkatan pengangguran akan meningkat yang kemudian akan diiringi dengan meningkatnya angka kemiskinan.

Masalah pengangguran dan ketenagakerjaan sampai saat ini masih menjadi perhatian utama di Indonesia khususnya di kota-kota yang ada di Indonesia salah satunya adalah Kota Bandar Lampung. Meningkatnya jumlah tenaga kerja seringkali menjadi persoalan ekonomi yang sulit diselesaikan oleh pemerintah. Sebagai akibat dari kurangnya pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan sehingga tenaga kerja yang ada tidak terserap secara penuh yang mengakibatkan jumlah pengangguran meningkat.

Mewujudkan perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas dan daya saing bagi angkatan kerja maka, diperlukan memberikan pengembangan kompetensi kerja yang diwujudkan dalam program pemerintahan. Salah satu masalah pokok yang dihadapi adalah masalah pengangguran. Pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial politik yang juga semakin meningkat. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, arus migrasi yang terus mengalir, serta dampak krisis

ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, membuat permasalahan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks.

Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja dan kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja, dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung Berikut data jumlah pengangguran di Provinsi Lampung 2019-2021 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bandar Lampung

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
	Laki-Laki	Perempuan		
2019	2,180	14,562	16,742	7,12
2020	32,607	16,134	48,741	8,79
2021	32,124	17,427	49,551	8,85
2022	26,190	18,680	44,870	7,91

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dilihat jumlah pengangguran di Kota Bandar Lampung mengalami fluktuasi yang mana pada tahun-tahun tersebut sedang berada dalam kondisi Pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, dikarenakan adanya pandemi Covid-19 TPT di Kota Bandar Lampung mengalami kenaikan 1,54% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019. Pada tahun 2021, TPT Provinsi Lampung meningkat dari 8,79% pada tahun 2020 menjadi 8,485% pada tahun 2021. Jumlah pengangguran tertinggi berada pada tahun 2021 dengan jumlah mencapai 49,551 ribu jiwa atau sebesar 8,85% dari total angkatan kerja pada tahun 2021 dan tingkat pengangguran terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 16,742 atau sebesar 7,12% dari total angkatan kerja di tahun 2019. Sedangkan jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, tingkat pengangguran tertinggi adalah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki yang di tahun 2020 mencapai 32,607 jiwa dan tingkat pengangguran terendah berjenis kelamin perempuan berada pada tahun 2019 yang berjumlah 14,562 jiwa.

Salah satu penyebab banyaknya pengangguran di Kota Bandar Lampung adalah minimnya lapangan pekerjaan dan kurangnya keahlian dari para pencari kerja. Selain itu, hadirnya Pandemi Covid-19 di Indonesia khususnya di Kota

Bandar Lampung juga sangat berdampak besar yang mengakibatkan jumlah pengangguran bertambah. PHK pada pekerja terpaksa dilakukan karena melemahnya perekonomian di masyarakat sehingga banyak sektor yang mengalami kerugian operasional. Akibat dari banyaknya pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menyebabkan jumlah pengangguran semakin bertambah dari tahun 2019 sampai 2021. Kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah kepada masyarakat guna mencegah dan mengurangi penyebaran Covid-19 juga berdampak terhadap masyarakat dalam mencari lapangan pekerjaan karena semakin mengurangi jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.

Hadirnya Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*) yang melanda Indonesia dan secara resmi ditetapkan sebagai wabah nasional oleh Presiden Joko Widodo dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional yang mulai berlaku pada tanggal 13 April 2020 telah memperparah masalah pengangguran dan ketenagakerjaan yang ada di Kota Bandar Lampung. Covid-19 mulai menjadi permasalahan besar terdapat sektor-sektor fundamental di Kota Bandar Lampung.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah atau memperlambat penyebaran Covid-19, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang kemudian turunkan peraturannya yang berupa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 telah berdampak bagi masyarakat Kota Bandar Lampung, dimana beberapa pasal dalam peraturan tersebut mengatur mengenai pekerjaan apa saja yang masih boleh dan tidak boleh beroperasi di tengah pandemi sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi PHK dan meningkatnya angka pengangguran.

Pandemi Covid-19 yang terus berlanjut sampai tahun 2021 telah memunculkan berbagai dampak mulai dari perilaku masyarakat, pelaku usaha dan sosial demografi yang mana hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa PHK merupakan akibat yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 (www.bps.go.id). Berdasarkan informasi dari Ketua Gugus Percepatan

Penanganan Covid-19 Doni Monardo yang dilangsir dalam media pemberitaan mencatat 1,6 juta pekerja Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan sebagai dampak ekonomi pandemi virus corona (<https://www.cnnindonesia.com>). Dilangsir dari media pemberitaan terdapat hasil survei SMRC menyatakan 77 % warga menilai pandemi Covid-19 telah mengancam penghasilan mereka. Pandemi itu membuat mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa meminjam dan tabungan berkurang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam beberapa minggu (<https://www.voaindonesia.com>). Selain itu Organisasi Buruh Internasional (ILO) melaporkan, sebanyak 81 persen dari tenaga kerja global yang berjumlah sekitar 3,3 miliar, atau 2,67 miliar pekerja saat ini terkena dampak penutupan tempat akibat pandemi virus Covid-19. Sementara 1,25 miliar pekerja diantaranya terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dampak dari Pandemi Covid-19 yang dirasakan masyarakat Kota Bandar Lampung adalah pada sektor formal dan informal lapangan pekerjaan. Banyak pemilik perusahaan menengah ke bawah sudah mulai gulung tikar, bukan hanya perusahaan menengah ke bawah yang terkena imbasnya, perusahaan yang tergolong besar juga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan/buruhnya imbas Covid-19 yang tak dapat ditepis sehingga membuat angka pengangguran di Kota Bandar Lampung meningkat.

Ditengah pandemi Covid-19 ini tentunya persaingan para pencari kerja semakin ketat, namun banyak masyarakat yang sulit beradaptasi karena semakin meningkatnya kemampuan yang diperlukan Pekerja Indonesia. Kondisi saat ini membuat masyarakat kalah dalam berkompetisi di dunia kerja (Memah et al., 2022). Dalam situasi dan kondisi seperti ini tentunya kebijakan pemerintah sangatlah dianggap penting, karena dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah nantinya yang akan menentukan bagaimana nasib masyarakat dalam aktivitas kesehariannya terutama menyangkut lapangan pekerjaan.

Guna meminimalisir maupun dalam pencegahan meningkatnya angka pengangguran yang diikuti Pandemi Covid-19 berbagai strategi untuk mengatasi pengangguran dikeluarkan sebagai senjata dalam mengatasi pengangguran. Salah satu program yang dikeluarkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui

Program Kartu Prakerja menetapkan pengembangan kompetensi kerja melalui Program Kartu Prakerja dalam rangka perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, dan daya saing bagi angkatan kerja perlu diberikan pengembangan kompetensi kerja yang kemudian disusul dengan dikeluarkan peraturan teknisnya yakni, Peraturan Menteri Keuangan No. 25/PMK.O5/2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, kartu ini pun resmi diluncurkan pada tanggal 11 april 2020.

Pihak pemerintah melalui situs prakerja.go.id menyampaikan bahwa proses belajar dan berlatih semestinya tak mengenal usia (*long-life education*). Sebab, tujuan Kartu Prakerja ini ingin mengurangi angka pengangguran maupun mencegah pengangguran. Penerima Kartu Pra Kerja akan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan kriterianya masing-masing.

Program Kartu Prakerja merupakan program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Pengembangan kompetensi kerja ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan *skill gap* yang menjadi permasalahan tidak hanya bagi angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan, tetapi juga tenaga kerja dan para wirausahawan (prakerja.go.id).

Tabel 1.2 Anggaran Dan Realisasi Program Kartu Prakerja

Tahun	Anggaran	Target Peserta	Realisasi
2020	Rp 20 Triliun	5,6 Juta Peserta	Rp 19,9 Triliun
2021	Rp 21 Triliun	5,9 Juta Peserta	Rp 21,20 Triliun
2022	Rp 11 Triliun	4,5 Juta Peserta	Rp 17,84 Triliun

Sumber : <https://djpb.kemenkeu.go.id/>

Kartu Prakerja sendiri awalnya tidak secara spesifik didesain untuk menjadi bagian dari program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Program Kartu Prakerja belum sempat diluncurkan, tetapi karena adanya pandemi Covid-19 ini, program Kartu Prakerja disesuaikan sifatnya menjadi semi-bantuan sosial. Di samping itu program ini mendapat amanat tambahan untuk menjaga daya beli masyarakat terdampak Covid-19 yang belum terlindungi. Kemudian, Program Kartu Prakerja sejak tahun 2020 menjadi komponen dari program PEN pada cluster Perlindungan

Sosial dengan anggaran sebesar Rp20 triliun dan target 5.600.000 peserta. Jumlah anggaran tersebut merupakan 2,88 persen dari keseluruhan anggaran PEN pada tahun anggaran 2020 dengan realisasi mencapai Rp19,9 triliun atau 99,5 persen dari pagu anggaran dengan capaian 5.604.810 peserta atau 100,09 persen dari target. Kemudian di tahun 2021, pagu anggaran untuk program Kartu Prakerja mengalami peningkatan sebesar 6 persen menjadi Rp21,20 triliun dengan target 5.929.329 peserta (<https://djpb.kemenkeu.go.id/>) .

Dari sisi realisasi belanja, realisasi anggaran program Kartu Prakerja tumbuh Rp1,25 triliun atau 6.28 persen menjadi Rp21,15 triliun dengan capaian output mencapai 5.956.608 atau 100,46 persen dari target. Dari sisi persentase realisasi anggaran juga terjadi peningkatan yaitu dari 99,5 persen di tahun anggaran 2020 menjadi 99,75 persen di tahun 2021.

Setelah diresmikan pada tanggal 11 april 2020 Program kartu Prakerja yang dibuat oleh pemerintah pusat mulai berlaku di Kota Bandar Lampung pertanggal 14 April 2020. Adapun *Stakeholder* pada pemerintah daerah dalam pelaksanaan program kartu pra kerja ialah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung. Dengan adanya kartu Prakerja pemerintah ingin menciptakan Tenaga Kerja yang berkualitas melalui pelatihan serta mengembangkan kompetensi dan kesempatan bagi para pencari kerja. Selain itu kartu Prakerja juga merupakan kartu yang diberikan kepada pencari kerja, Pekerja dan Pekerja yang terkena dampak PHK untuk mendapatkan layanan Pelatihan berupa *skilling*, *up-skilling*, dan *re-skilling* serta sertifikasi kompetensi kerja yang nantinya menjadi bekal untuk bersaing dalam dunia kerja dimasa Pandemi Covid-19 (Anelia Meilani L.G, 2021).

Lahir pada era pandemi Covid-19, Kartu Prakerja juga menjadi salah satu program Jaring Pengaman Sosial yang amat diandalkan, bersanding dengan 6 program lainnya yakni Program Keluarga Harapan (PKH), BLT Desa, Sembako, Bantuan Subsidi Upah, Insentif Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, serta subsidi listrik (Barany, L. J., Simanjuntak, I., Widia, D. A., & Damuri, Y. R., 2020). Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, penerima manfaat Program Kartu Pra Kerja di Kota Bandar Lampung mulai dari gelombang 1 sampai gelombang 11 pada tahun 2020 sebanyak 14.342 peserta dan pada tahun 2021 program kartu pra kerja dilanjutkan hingga

september 2021 tercatat dari gelombang 12 sampai dengan 22 berjumlah 26.914 peserta.

Guna merespon dampak dari pandemi Covid-19 dalam Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. HM.4.6/127/SET.M.EKON.2.3/09/2020, Kartu Prakerja dapat bersifat semi-bansos. Kartu Prakerja diharapkan dapat menjadi program pemberdayaan yang efektif tidak hanya di masa pandemi, tetapi juga setelah pandemi berakhir. Sebenarnya Kartu Pra-Kerja ini adalah salah satu realisasi janji kampanye Presiden Jokowi yang ingin menciptakan sumber daya manusia premium yang mampu bersaing dalam dan luar negeri dengan titik fokus melatih keterampilan individu dan mempersiapkan angkatan kerja untuk bisa bersaing di dunia kerja.

Program Kartu Pra-Kerja ini bisa dibilang tidak berjalan mulus, terdapat berbagai polemik didalamnya yang mulai dari akan membebani keuangan negara, anggaran alokasi yang melonjak dari Rp 10 triliun rupiah menjadi Rp. 20 Triliun rupiah, mekanisme pelatihan yang berubah total menjadi serba daring diakibatkan pandemi Covid-19 yang melanda negeri sehingga pemerintah bekerja sama dengan mitra kerja seperti *Skill Academy* oleh ruang guru, MauBelajarApa, Pintaria, Sekolah.mu dan pijar mahir. Kritik juga tak luput dari program kartu Prakerja dari salah satu ekonom yang bernama Indef Bhima Yudhistira yang mengungkapkan skema program kartu Prakerja sudah salah sejak awal. Seharusnya, pemerintah tak memaksakan program itu tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19. Masalahnya masyarakat tak membutuhkan pelatihan ditengah pandemi, yang mereka lebih butuhkan adalah dana tunai yang mencukupi untuk membeli kebutuhan pokok agar tetap hidup (www.cnnindonesia.com).

Dalam pelaksanaan program kartu pra kerja di Kota Bandar Lampung terdapat beberapa kendala yaitu masih kurangnya sosialisasi terkait teknis pendaftaran kartu pra kerja yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja Kota Bandar Lampung sebagai *stakeholder*, keluhan juga datang dari para calon penerima manfaat kartu Prakerja dikarenakan pelatihannya hanya monoton secara online yang membuat peserta merasa bosan dan secara tidak langsung tidak meningkatkan kompetensi atau kemampuan yang dimiliki oleh penerima manfaat program tersebut sesuai dengan tujuan program kartu Prakerja. Selain hal tersebut tidak

semua bidang keahlian ada dalam program Kartu Prakerja. Masyarakat yang telah mempelajari pelatihan keterampilan juga kebanyakan belum dapat secara langsung untuk mengimplementasikan keahliannya untuk membuka usaha dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan masih terbatasnya jam operasional kerja dan peraturan pemerintah lainnya dalam pencegahan dan penanggulangan Covid -19.

Jika dilihat dari sudut pandang konstitusi maka program Kartu Pra-Kerja ini merupakan wujud pengimplementasian dari pasal 27 Ayat (2) UUD tahun 1945 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.". Namun setelah mengikuti rangkaian prosedur dan pelatihan prakerja, pemerintah pun tidak memberi jaminan secara konkret apakah setelah mengikuti rangkaian kegiatan tersebut akan mendapat pekerjaan atau penghasilan. Termasuk jaminan yang diberikan terhadap para pekerja/buruh yang sudah di PHK oleh pemilik perusahaan, apakah mereka akan mendapatkan pekerjaannya kembali setelah badai Covid-19 ini berakhir. Kartu Pra-Kerja ini sendiri bisa dibilang merupakan bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan, karena kartu Prakerja seolah diibaratkan sebuah kail pancing dalam mencari ikan ditengah sungai dengan sedikit ikan yang ada sedangkan banyak pemancing disana. Padahal Program ini pun harus dibarengi dengan adanya ketersediaan lapangan pekerjaan yang sebanding dengan angkatan kerja agar para angkatan kerja ini dapat terserap.

Mengenai efektivitas kartu Prakerja terhadap dampak Covid-19 sebuah penelitian juga pernah dilakukan oleh (Memah et al., 2022) di daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan hasil penelitian menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan dari sisi pengetahuan dan keterampilan para peserta program kartu Prakerja dan menurunnya tingkat pengangguran di Sulawesi Utara. Integritas dari program ini menggambarkan adanya integritas yang cukup baik dilihat dari sosialisasi yang diterima oleh peserta prakerja yang rata-rata melalui informasi di media sosial. Akan tetapi, ada kekurangan mengenai penjelasan lebih rinci terkait cara pendaftaran ataupun layanan khusus masyarakat dalam menangani keluhan terkait Prakerja.

Hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Consuello (2020) Jika melihat kondisi saat Covid-19, maka kurang tepat bilamana

mengeluarkan kartu Prakerja sebagai kebijakan untuk mengurangi angka pengangguran, karena yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah bantuan yang cepat dan konkret. Cepat disini dimaksudkan bantuan yang diterima langsung tanpa harus berhadapan dengan prosedural-prosedural atau proses seleksi yang dapat menghambat waktu turunnya bantuan tersebut. Konkret disini adalah yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Perlunya pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan program kartu Prakerja ini agar terealisasikan secara cepat dan konkret.

Walaupun demikian Program Kartu Prakerja tetap berlanjut sampai 2023, alasannya menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Antusiasme masyarakat terhadap Program Kartu Prakerja selama tahun 2022 lalu juga mendorong Pemerintah untuk dapat terus melanjutkan program tersebut pada tahun 2023. Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2023 dengan target capaian hingga 1 juta penerima. Pada tahap awal, anggaran akan dialokasikan sebesar Rp2,67 triliun untuk mencapai target sebanyak 595 ribu orang. Sedangkan, untuk sisa target sebesar 405 ribu orang, Pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,7 triliun.

Tidak cuman sampai disitu, pemerintah juga memastikan di tahun 2024 Program Kartu Prakerja masih berlanjut. Deputy III Kantor Staf Presiden selaku Anggota Tim Pelaksana Kartu Prakerja Edy Priyono menyampaikan bahwa program tersebut masih akan berjalan pada 2024 atau di akhir periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Akan tetapi semua sangat tergantung kepada keputusan pemerintahan baru karena pada dasarnya Kartu Prakerja tercantum dalam Perpes, selama peraturan tersebut belum dicabut, maka program tersebut masih akan berlaku. Anggaran yang dikeluarkan untuk tahun 2024 jumlahnya akan sama dengan tahun 2023 yaitu 4,37 triliun dengan jumlah penerima yang ditargetkan pemerintah sebanyak 1 juta penerima Kartu Prakerja.

Berdasarkan penguraian latar belakang masalah di atas, dengan melihat beragam permasalahan dalam proses implementasi Kebijakan Kartu Prakerja dan ketidak konsistensian penelitian terdahulu yang dapan menimbulkan *research gap*, penulis tertarik untuk mengkaji tentang keefektifan dari Kebijakan Kartu Prakerja di Bandar Lampung. Oleh karena itu, judul penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah “Efektivitas Kebijakan Kartu Prakerja Periode 2021 Dengan

Studi Pencari Kerja, Pekerja Dan Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kota Bandar Lampung”.

1.2 Rumusan masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana efektivitas Kartu Prakerja periode tahun 2021 dengan studi pada pencari kerja, pekerja dan pekerja yang terdampak PHK di Kota Bandar Lampung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas kebijakan Kartu Prakerja periode tahun 2021 dengan studi pada pencari kerja, pekerja, dan pekerja yang terdampak PHK di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran mengenai efektivitas dari suatu program kebijakan pemerintah yang dalam hal ini merupakan Kartu Prakerja dengan studi terhadap pencari kerja, pekerja, dan pekerja yang terdampak (PHK) khususnya di Kota Bandar Lampung.

1.4.2 Bagi Pemerintah

Manfaat yang dapat diambil dengan adanya penelitian ini adalah membantu pemerintah dalam mewujudkan kemajuan kesejahteraan soial dengan mengetahui efektivitas dari kebijakan Kartu Prakerja dengan studi pada pencari kerja, pekerja, dan pekerja yang terdampak PHK di Kota Bandar Lampung.

1.4.3 Bagi Peneliti

Menambah Ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai capaian dan efektivitas dari program Kartu Prakerja dalam upaya meningkatkan kesejateran sosial masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dampak Covid-19

Covid-19 merupakan Virus Corona yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus Corona ini adalah jenis virus baru yang sangat mudah menular antar manusia. Virus corona memiliki gejala klinis seperti demam, batuk, pilek, sesak nafas, letih dan lesu (Nasution et al., 2020).

Organisasi Kesehatan dunia (WHO) menyatakan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional untuk mengoordinasikan tanggapan terhadap penyebaran Covid-19. Covid-19 pertama masuk ke Indonesia bulan maret pada tahun 2020 dengan korban meningkat setiap harinya. Akibat dari penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat pemerintah Indonesia melakukan pembatasan beraktivitas baik dalam Pendidikan, Ekonomi dan pariwisata sehingga menyebabkan ruang gerak masyarakat terhambat. Hal tersebut memberikan dampak yang besar di berbagai sektor industri yang memperlambat laju perekonomian di Indonesia. Karena melemahnya perekonomian di masyarakat sehingga banyak sektor yang mengalami kerugian operasional. Akibatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada pekerja terpaksa dilakukan yang menyebabkan jumlah pengangguran semakin bertambah.

2.2 Program Kartu Prakerja

Untuk meminimalisir dampak ekonomi di tengah pandemi Covid-19 ini, Pemerintah menetapkan kebijakan Program Kartu Prakerja dimasyarakat. Berdasarkan PERPRES No.36 Tahun 2020 Tentang pengembangan kompetensi kerja melalui Program kartu Prakerja yakni adanya penyesuaian Program Kartu Prakerja sebagai bantuan dari bantuan sosial untuk penanggulangan Covid-19 sehingga terdapat penambahan peserta yang diperbolehkan yakni para buruh yang terkena

PHK. Program kartu Prakerja berawal dari gagasan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Tahun 2019. Dengan adanya kartu Prakerja pemerintah ingin menciptakan Tenaga Kerja yang berkualitas melalui pelatihan serta mengembangkan kompetensi dan kesempatan bagi para pencari kerja.

Seperti yang dilansir di situs resmi www.prakerja.go.id program Prakerja adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditunjukkan untuk pencari kerja, pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau Pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Dengan mengikuti program ini, para pemegang kartu Prakerja akan mendapatkan bantuan biaya total Rp.3.550.000 dengan rincian biaya pelatihan Rp.1.000.000 untuk 3 kali pelatihan yang dilaksanakan secara online, Rp.2.400.000 untuk bantuan manfaat yang dibagi 4 bulan, dan Rp.150.000 untuk insentif pengisian survey yang dibagi 3 kali pencairan.

Syarat utama untuk mengikuti program kartu Prakerja ini adalah Warga Negara berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah ataupun kuliah. Fokus program kartu Prakerja ini adalah untuk masyarakat pencari kerja, Masyarakat dampak Pemutusan Hubungan kerja (PHK) maupun pekerja yang ingin menambah kemampuan kreativitasnya. Untuk mendapatkan kartu Prakerja peserta melakukan pendaftaran di situs resmi kartu Prakerja yaitu www.prakerja.go.id dengan memasukkan data diri lengkap untuk dilakukan verifikasi. Kemudian, Peserta mengikuti tes kemampuan dasar maupun motivasi. Lalu, peserta menunggu hasil pengumuman dinyatakan lolos atau tidak (Wijayanti & Humardhiana, 2020).

Pengertian pekerja berbeda dengan pengertian tenaga kerja sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Sedangkan, dalam Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dalam menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pekerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah atau imbalan lain. Adapun, Pencari kerja merupakan seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari

pekerjaan maupun seseorang yang telah bekerja tetapi ingin alih pekerjaan yang lebih baik dengan cara mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kesempatan kerja (Franita, 2016).

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pemutusan hubungan kerja merupakan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menjelaskan adanya upaya pengusaha untuk menghindari pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), sebagai berikut:

1. Pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan pekerja melakukan kesalahan, baik kesalahan berat maupun kesalahan ringan.
2. Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilatarbelakangi oleh perselisihan hubungan industrial.
3. Pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan efisiensi perusahaan dan terdapat kerugian perusahaan.
4. Pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan pengunduran diri oleh pekerja dalam menghindari kewajiban pengusaha untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

2.2.1 Tujuan Kartu Prakerja

Bedasarkan PERPES No.36 Tahun 2020 Tentang pengembangan kompetensi kerja melalui Program kartu Prakerja Program kartu prakerja bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan.

Kartu Prakerja tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari kerja, namun juga untuk pekerja/buruh yang terkena PHK dan pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pelaku usaha mikro dan kecil. Untuk merespon dampak dari Covid-19, Program kartu Prakerja untuk sementara waktu akan diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang dirumahkan maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak penghidupannya.

2.2.2 Syarat Penerima Manfaat Kartu Prakerja

Berdasarkan PERPES No.36 Tahun 2020 Tentang pengembangan kompetensi kerja melalui Program kartu Prakerja Program kartu prakerja terdapat beberapa syarat dalam mengikuti kartu prakerja yaitu :

1. Warga Negara Indonesia
2. Berusia 18 tahun ke atas
3. Tidak sedang mengikuti pendidikan formal
4. Bukan Pejabat Negara Yaitu :
 - a. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - b. Aparatur Sipil Negara
 - c. Prajurit Tentara Nasional Indonesia
 - d. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - e. Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - f. Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah

2.3 Efektivitas

2.3.1 Pengertian Efektifitas

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Efektivitas adalah suatu kosa kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *efektive* yang berarti berhasil, ditaati, mengesankan mengesankan mujarab dan mujur. Dari sederetan arti diatas, maka yang paling tepat adalah berhasil dengan baik. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan (Rawie & Samputra, 2020).

Konsep efektivitas berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dihasilkan berhasil dengan baik. Efektivitas juga dapat diartikan dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai (Sawir, 2020). Menurut Effendy (Sawir, 2020) efektivitas didefinisikan sebagai komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan

Dikaitkan dengan penelitian yang akan dilakukan, efektivitas yang dimaksud adalah tercapainya sasaran program Kartu Pra Kerja sehingga berhasil guna bagi pencari kerja, pekerja yang ingin meningkatkan kompetensi dan pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

2.3.2. Unsur-Unsur Dari Kriteria Efektivitas

Persoalan efektivitas tidak terbatas pada keadaan yang bersifat konstitusional saja melainkan terdapat pada seluruh aspek kehidupan manusia dengan berbagai aktivitasnya. Unsur-unsur dari kriteria efektivitas menurut makmur (Sawir, 2020) yaitu sebagai berikut :

1. Ketepatan penentuan waktu
2. Ketepatan perhitungan biaya
3. Ketepatan dalam pengukuran penghasilan
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan
5. Ketepatan berfikir
6. Ketepatan dalam melakukan perintah
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan
8. Ketepatan sasaran

2.3.3 Indikator Efektivitas

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan sebuah organisasi sangat perlu untuk mengukur atau mengetahui sejauh mana langkah efisiensi dilakukan dalam organisasi tersebut. Budiani (2007) untuk mengukur keefektivan suatu program, terdapat beberapa kriteria dalam mengukur efektivitas program, antara lain:

1. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program dapat mencapai sasaran dengan tepat.
2. Sosialisasi program, yaitu sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat berdasarkan kemampuan pihak penyelenggara program.
3. Tujuan program, yaitu kesinambungan antara tujuan dengan hasil pelaksanaan program.
4. Pemantauan program, yaitu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada peserta program.

2.3.4 Konsep Efektivitas Pelayanan Publik

Subtansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah (partai politik, organisasi keagamaan atau organisasi kemasyarakatan lainnya). Siapapun bentuk dari institusi pelayanannya, maka yang terpenting adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya dengan prosedur yang tidak berbeli-belit, cepat, tepat dan memuaskan (Sawir, 2020).

2.4 Pengangguran

Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa per Februari 2022, tingkat pengangguran Indonesia tercatat sebesar 5,83 persen dari total penduduk usia kerja sejumlah 208,54 juta orang. Umumnya, penyebab pengangguran adalah ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia. Artinya, jumlah tenaga kerja lebih banyak dari jumlah lapangan kerja.

2.4.1 Pengertian Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Sedangkan menurut Sukirno (2013), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung.

Bagi kebanyakan orang kehilangan suatu pekerjaan merupakan penurunan suatu standar kehidupan. Jadi tidak mengejutkan apabila pengangguran menjadi topik yang sering diperbincangkan dalam perdebatan politik oleh para politisi yang seringkali mengkaji bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu terciptanya lapangan pekerjaan (Mankiw,2000).

2.4.2 Jenis-Jenis Pengangguran

Berdasarkan penyebabnya pengangguran dapat dibagi empat kelompok (Sukirno, 2013) :

1. Pengangguran Normal atau Friksional

Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik.

Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya pengusaha susah memperoleh pekerja, akibatnya pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. Dalam proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur. Mereka inilah yang digolongkan sebagai pengangguran normal.

2. Pengangguran Siklikal

Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan banyaknya. Misalnya, di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan

kemerosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan, yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, sehingga pengangguran akan bertambah. Pengangguran dengan wujud tersebut dinamakan pengangguran siklikal.

3. Pengangguran Struktural

Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut: wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan ke atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi.

4. Pengangguran Teknologi

Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun ilalang dan rumput misalnya, telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah dan lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik, ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi.

Adapun jenis pengangguran berdasarkan cirinya dibagi menjadi empat kelompok (Sukirno, 2013):

1. Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat penambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari penambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.

2. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung pada banyak faktor, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan (apakah intensif buruh atau intensif modal) dan tingkat produksi yang dicapai. Pada negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contohnya ialah pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil.

3. Pengangguran Musiman

Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. Disamping itu pada

umumnya para petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa tersebut para penyadap karet, nelayan dan petani tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim.

4. Setengah Menganggur

Pada negara-negara berkembang migrasi dari desa ke kota sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagian terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Disamping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur (*underemployed*) Dan jenis penganggurannya dinamakan underemployment.

2.4.3 Dampak Pengangguran

Beberapa akibat buruk dari pengangguran dibedakan kepada dua aspek (Sukirno,2013) dimana dua aspek tersebut yaitu :

1. Dampak buruk terhadap kegiatan perekonomian

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tangguh. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran. Akibat-akibat buruk tersebut dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Pengangguran menyebabkan tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya.
- b. Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, dan dalam kegiatan ekonomi yang rendah pendapatan pajak pemerintah semakin sedikit.

- c. Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Yang pertama, pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Kedua, pengangguran yang diakibatkan oleh keuntungan kelesuan kegiatan perusahaan yang rendah menyebabkan berkurangnya keinginan untuk melakukan investasi.
2. Dampak buruk terhadap individu dan masyarakat
- Pengangguran akan mempengaruhi kehidupan individu dan kestabilan sosial dalam masyarakat. Beberapa keburukan sosial yang diakibatkan oleh pengangguran adalah :
- a. Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan.
 - b. Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Keterampilan dalam mengerjakan suatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek.
 - c. Pengangguran dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat terhadap pemerintah.

2.4.4 Faktor Penyebab Pengangguran

Menurut (Franita, 2016) Pengangguran adalah suatu hal yang tidak dikehendaki, namun suatu penyakit yang terus menjalar di beberapa Negara, dikarenakan banyak faktor – faktor yang mempengaruhinya. Mengurangi jumlah angka pengangguran harus adanya kerjasama lembaga pendidikan masyarakat maupun pemerintahan. Berikut adalah beberapa faktor penyebab pengangguran :

1. Jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang.
2. Kemajuan teknologi sehingga manusia tergantikan oleh robot atau mesin.
3. Keterampilan dan pengalaman yang dimiliki tidak sesuai kriteria.
4. Kurangnya pendidikan/batasan pendidikan.
5. Kemiskinan.

6. Pemutusan hubungan kerja (PHK).
7. Tempat tinggal yang jauh dari domisili.
8. Kalah dalam persaingan pasar global.
9. Kesulitan mencari lowongan kerja.
10. Harapan untuk calon pekerja terlalu tinggi.

2.4.5 Upaya Mengurangi Pengangguran

Dalam mengupayakan pengurangan pengangguran ada beberapa bentuk upaya untuk mengurangi jumlah pengangguran (Bachtiar et al., 2020) :

1. Peran pendidikan sangat berperan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dengan menghadirkan kurikulum sesuai dengan keinginan pasar. Agar para sumber daya manusia dapat dibekali pengetahuan dan skill yang dapat menunjang para pencari kerja mandiri dalam mencari kerja ataupun menjadi wiraswasta.
2. Pemerintah membuat pelatihan – pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pencari kerja agar mampu mandiri dari ekonomi. Misalnya Pemerintah member pelatihan Kewirausahaan agar mereka mampu berwirausaha dan menciptakan produk.
3. Pemerintah menyokong dan memperluas objek wisata di daerah – daerah yang berpotensi dalam pengembangan pariwisata. Dan meningkatkan pemasukan daerah. Pengembangan pariwisata di suatu daerah sangat berdampak baik dengan adanya pengembangan wisata daerah mampu menyedot tenaga kerja dan memancing para investor untuk menanam saham di negara Indonesia.mpu menyedoot para wisatawan yang akan berwisata, itu akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Daerah yang memiliki objek wisata akan akan me numbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat serikat dan akan mampu mengurangi angka pengangguran dan mensejahterahkan masyarakat.
4. Pemerintah dan masyarakat harus menyokong wisata kuliner. Di era 2000 ini Wisata kuliner menjadi salah satu income yang sangat tinggi. Dengan banyaknya wisata kuliner mampu mempercepat kegiatan ekonomi yang akan merangsang masyarakat dalam membuka usaha kuliner yang akan

membutuhkan para pekerja yang nantinya akan menurunkan angka pengangguran.

5. Pemerintah harus mampu merangsang para investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Investasi merupakan hal yang penting dalam pembangunan ekonomi karena sebagai faktor penunjang didalam peningkatan proses produksi.

2.5 Evaluasi Kebijakan Publik

2.5.1 Pengertian Kebijakan Publik

Perlunya mengetahui memahami kebijakan yang ada, karena kebijakan tidak bisa dipahami secara tekstual tetapi banyak sekali hal yang tersirat (kontekstual). Ada dua hal yang timbul dari penetapan kebijakan yaitu kebijakan yang berorientasi pada pelayanan publik yang dalam arti sesuai dengan makna demokrasi dan kebijakan yang meracuni publik/kebijakan yang ditetapkan hanya untuk kepentingan beberapa kalangan saja (Uddin dan Sobirin, 2017).

Menurut Riant Nugroho (Uddin dan Sobirin, 2017) kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil. Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam 3 (tiga) prinsip yaitu (Uddin dan Sobirin, 2017):

1. Konteks bagaimana menentukan kebijakan publik (formula Kebijakan)
2. Bagaimana kebijakan publik di implementasikan
3. Bagaimana kebijakan publik tersebut di evaluasi

2.5.2 Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik

Dalam Siklus Konsep Kebijakan, evaluasi kebijakan menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, dari proses evaluasi kebijakan akan didapatkan informasi mengenai berhasil atau tidak berhasilnya suatu kebijakan dan diperoleh implikasi kebijakan dan rekomendasi kebijakan apakah dapat dilanjutkan, diperlukan perbaikan/perubahan sebelum dilanjutkan, atau justru suatu kebijakan harus dihentikan. Hampir di semua lembaga/organisasi membutuhkan siklus proses evaluasi kebijakan. Hal ini dikarenakan fungsi evaluasi kebijakan menjadi poin yang penting dan dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap suatu kebijakan yang telah di buat. Terlebih dalam konteks kekinian,

dimana masyarakat semakin kritis dan partisipatif dalam menilai setiap kebijakan yang berkaitan dengan publik (Anis Ribcalia Septiana, et.al, 2023). Situmorang (2016) menjelaskan pengertian evaluasi kebijakan dilakukan guna menemukan penyebab dari kegagalan kebijakan dan apakah kebijakan tersebut berakhir pada dampak yang di cita-citakan.

2.5.3 Tipe Evaluasi Kebijakan Publik

Anis Ribcalia Septiana, et.al (2023) mengungkapkan bahwa terdapat 4 (empat) macam jenis evaluasi kebijakan publik yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Evaluasi proses, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi
2. Evaluasi dampak, yang fokus pada hasil akhir suatu kebijakan
3. Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan
4. Meta-evaluasi, yang merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi dari berbagai kebijakan yang terkait.

Jika mencermati pandangan-pandangan tersebut di atas, tipe-tipe dalam proses evaluasi kebijakan memiliki kecenderungan pada proses dan fokus terhadap penilaian kebijakan yang telah dibuat. Implikasi dari proses evaluasi ini akan memberikan dampak pada rekomendasi kebijakan yang perlu diambil dan dilakukan kedepannya. Oleh karena itu, sebagai bagian dari proses kebijakan publik, fase dan tipe-tipe evaluasi kebijakan ini perlu dipahami oleh pembuat kebijakan sebagai bagian dalam proses standarisasi pembuatan kebijakan selanjutnya.

2.5.4 Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik

Sebagai bagian dari tahapan dalam proses kebijakan, evaluasi kebijakan memiliki fungsi dan tujuan yang penting. Menurut Nugroho (Anis Ribcalia Septiana, et. al, 2023) evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola- pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi kebijakan ini evaluator

dapat mengidentifikasi terkait masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan.

2. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan
3. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah *output* benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan atau justru ada kebocoran atau penyimpangan dalam implementasinya
4. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Pendapat lain dikemukakan Wibawa, *et. Al* (Anis Ribcalia Septiana, *et. al*, 2023) menurutnya evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu :

1. Eksplanasi, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamati. Dari evaluasi, elevator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan kebijakan.
3. Audit, melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan.
4. Akunting, evaluasi dapat diketahui apa akibat ekonomi kebijakan tersebut.

2.5.5 Tujuan Evaluasi Kebijakan Publik

Selain fungsi dari evaluasi kebijakan publik para pakar juga menjelaskan mengenai tujuan dari evaluasi publik. Subarsono (Anis Ribcalia Septiana, *et. al*, 2023) merinci beberapa tujuan dari evaluasi kebijakan antara lain sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.

2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui derajat berapa biaya dan manfaat suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan- penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang.

2.5.6 Model Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn dalam (Nugroho, 2017) ada beberapa pendekatan terhadap evaluasi kebijakan sebagai berikut :

1. Evaluasi semu

Proses pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, ataupun masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari model evaluasi ini adalah bahwa ukuran tentang manfaat dan nilai merupakan suatu yang dapat terbukti sendiri oleh ukuran-ukuran masing-masing individu, kelompok ataupun masyarakat.

2. Evaluasi formal

Tujuan evaluasi formal (*formal evaluator*) adalah untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil kebijakan yang didasarkan atas tujuan formal kebijakan secara deskriptif. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target yang diumumkan secara formal merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.

3. Evaluasi keputusan teoritis

Pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Asumsi dari evaluasi keputusan teoritis adalah bahwa tujuan dan sasaran dari perilaku kebijakan baik yang dinyatakan secara formal maupun secara tersembunyi merupakan ukuran yang layak terhadap manfaat atau nilai kebijakan program.

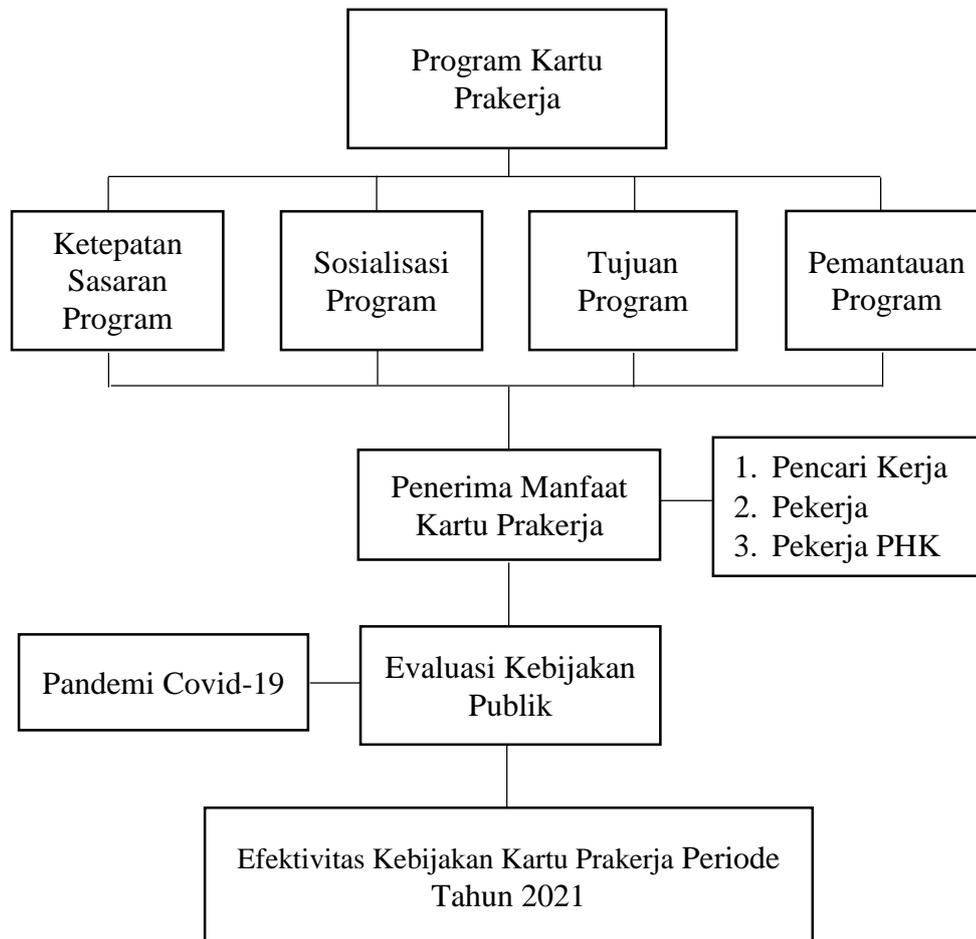
2.5.7 Dimensi Evaluasi Kebijakan Publik

Dalam evaluasi kebijakan publik, secara umum ada dua hal yang menjadi dimensi penting sebagai informasi dari proses evaluasi terhadap kebijakan yang dibuat. Dua hal tersebut adalah mengenai evaluasi kinerja pencapaian tujuan kebijakan dan evaluasi kebijakan dan dampaknya. Dalam proses evaluasi kinerja dilakukan pada sumber daya yang bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan. Dari proses ini akan di dapat informasi mengenai kinerja dari pelaksanaan kebijakan, efektifitas kinerja dan efisiensi kinerja yang terkait dengan kebijakan yang dilaksanakan. Sedangkan pada proses evaluasi kebijakan dan dampaknya, akan dapat diperoleh informasi tentang manfaat dari kebijakan dan dampak dari kebijakan (Anis Ribcalia Septiana, et. al, 2023).

2.6. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir merupakan kajian tentang bagaimana hubungan teori dengan berbagai konsep yang ada dalam perumusan masalah. Jadi, sebelum terjun kelapangan atau pengumpulan data, periset diharap mampu menjawab secara teoritis permasalahan penelitian. Dalam melaksanakan suatu penetian ilmiah kerangka berfikir sangat penting untuk mempermudah peneitian. Kerangka berfikir dapat menjelaskan secara langsung hubungan setiap variable yang akan diteliti. Secara definisi dapat dijelaskan kerangkan berpikir merupakan metode konseptual tentang bagaimana teori-teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiono, 2018).

Dapat disimpulkan kerangka berfikir adalah suatu penjelasan mengenai apa yang diteliti yang didapatkan dari suatu pendapat yang mendasar dan dijadikan tolak ukur dari seseorang yang akan meneliti. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ke Efektivitasan Program Kartu Prakerja dengan memahami Pro dan Kontra yang terjadi dalam pengimplementasian Kebijakan Program Kartu Prakerja di Masyarakat.

Jenis Penelitian ini sejalan dengan pengertian metode kualitatif menurut Menurut (Husaini, 2020) Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang menguraikan pendapat responden sesuai pertanyaan penelitian, selanjutnya dianalisis menggunakan kata-kata yang mendasari perilaku responden seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi. Penelitian ini bersifat merupakan penelitian yang dilakukan secara menyeluruh terhadap suatu objek dimana seorang peneliti menjadi instrumen utama dalam suatu penelitian serta menggambarkan kejadian dan fakta dari penelitian tersebut.

3.2 Fokus Penelitian

Menurut (Sugiono, 2019) Menjelaskan fokus penelitian Sebagai batasan masalah yang ada dalam penelitian kualitatif dimana fokus berisikan tentang pokok masalah yang bersifat umum. Sesuai dengan judul penelitian yaitu efektivitas kebijakan kartu Prakerja periode tahun 2021 (Studi pada pencari kerja, pekerja serta para pekerja yang ter PHK di Bandar Lampung) , maka sasaran atau fokus pada penelitian ini adalah tentang ke Efektivitas Kebijakan Kartu Pra Kerja bagi pencari kerja, pekerja serta para pekerja yang ter-PHK di Bandar Lampung. Analisis menggunakan indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Budiani (2007) yang sesuai dengan tujuan Program Kartu Pra kerja, sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program kartu Prakerja di Bandar Lampung dengan studi kasus pada pencari kerja,

pekerja, dan pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat mencapai sasaran dengan tepat.

2. Sosialisasi program, yaitu sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat berdasarkan kemampuan pihak penyelenggara program kartu Prakerja di Bandar Lampung.
3. Tujuan program kartu Prakerja, yaitu kesinambungan antara tujuan dengan hasil pelaksanaan program.
4. Pemantauan program kartu Prakerja, yaitu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada penerima manfaat kartu Prakerja.

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Sumber data menurut Arikunto (2013) adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sedangkan menurut Burhan Bungin (2017) sumber data adalah tempat dimana data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen guna mendukung penelitian. Maka dapat disimpulkan bahwa sumber data adalah faktor terpenting dalam penentuan metode pengumpulan data untuk mengetahui dari mana subjek data tersebut diperoleh.

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tempat objek penelitian dilakukan (Burhan Bungin, 2017). Sedangkan Data primer, menurut Sanusi (2014) adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti serta diperoleh secara langsung dari sumber asli.

Berdasarkan pengertian diatas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang dikumpulkan melalui survey lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang kepada pihak kompeten dalam pelaksanaan program kartu Prakerja yaitu :

1. Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung.
2. Masyarakat Kota Bandar Lampung penerima kartu Prakerja yaitu pencari kerja, pekerja dan pekerja yang mengalami PHK.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang disiapkan atau diolahkan oleh pihak lain atau organisasi yang bukan pengolahannya (Burhan Bungin, 2017). Sedangkan menurut Sanusi (2014) data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan serta didapat secara tidak langsung melalui media perantara oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang sudah tersedia sebelum penulis melakukan penelitian. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari arsip atau dokumen-dokumen mengenai pelaksanaan kartu Prakerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan atau memperoleh data lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati. Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi langsung yaitu pengamatan langsung dengan melibatkan diri kedalam kegiatan objek yang akan diteliti (Burhan Bungin, 2017). Dengan menggunakan metode observasi, penulis melakukan pengamatan secara langsung mengenai kegiatan dan kondisi Instansi tempat penulis melakukan penelitian pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik wawancara secara terstruktur berupa kumpulan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya

oleh peneliti untuk mengetahui secara jelas dan terperinci mengenai informasi yang dibutuhkan (Burhan Bungin, 2017). Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yaitu mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian yaitu :

- a. Pihak kompeten dalam pelaksanaan program kartu Prakerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung yaitu Bapak M. Yudhi selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung
 - b. Masyarakat Kota Bandar Lampung sebagai Penerima Kartu Prakerja yaitu Pencari Kerja, Pekerja dan Pekerja yang mengalami PHK.
3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dokumen-dokumen atau mengadakan pencatatan dan pengumpulan data yang diidentifikasi dari dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti daftar penerima kartu Prakerja di kota bandar lampung, Selain itu sebagai aspek pendukung dari data dokumentasi tersebut, tentunya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.5 Teknik Pengolahan Data

Setelah terkumpulnya data dari hasil survey lapangan, maka tahap berikutnya ialah mengolah data tersebut melalui teknik yang digunakan dalam pengolahan data sebagaimana yang disebutkan oleh (Moleong, 2017) yang terdiri dari :

1. Editing

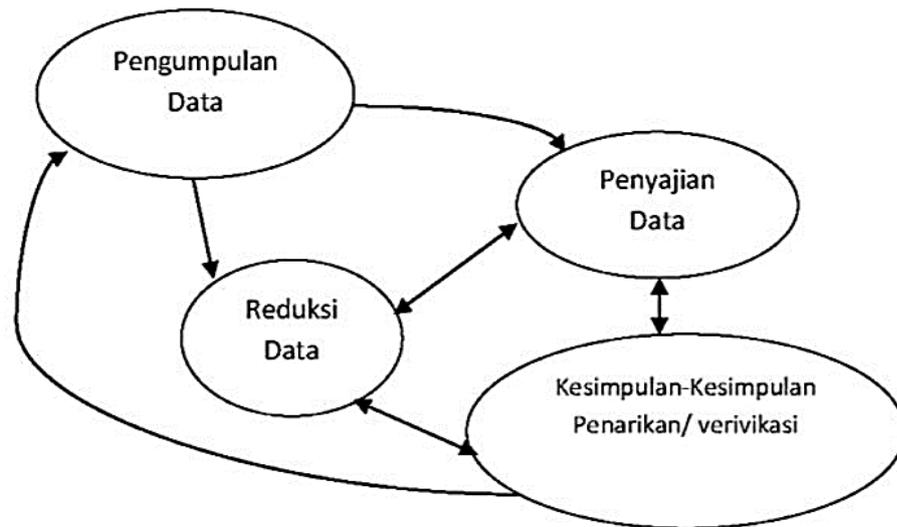
Editing yang dimaksud yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara mendalam dalam rangka menjamin validitas serta dapat segera diproses lebih lanjut. Adapun tahap editing yang dimaksud dalam penelitian ini menyajikan hasil wawancara berupa kalimat-kalimat yang kurang baku diubah dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami, sehingga hasil penelitian ini menjadi penelitian yang bersifat ilmiah.

2. Interpretasi

Interpretasi merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh di lapangan. Interpretasi yang dilakukan pada penelitian ini menitik beratkan pada pengkajian kalimat-kalimat yang dihasilkan melalui teknik wawancara maupun dokumentasi yang ada, sehingga antara data yang dihasilkan melalui teknik wawancara dapat sinkron dengan data yang dihasilkan melalui dokumentasi.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan selesai pengumpulan data pada periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban responden yang di wawancarai. Apabila jawaban yang diwawancarai tidak memuaskan atau dirasa belum cukup menjawab permasalahan dalam penelitian, maka peneliti akan melontarkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam menganalisis data yaitu dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi yang disebut dengan analisis data Model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019). Dengan menggunakan model Miles dan Huberman data-data dalam penelitian ini akan dibahas secara kualitatif yang dimulai sejak pengumpulan data dilapangan. Dengan demikian ketika peneliti mengumpulkan data dilapangan langsung diikuti dengan pekerjaan menuliskan, mengkategorisasikan, mengklasifikasikan, mereduksi, menganalisis, dan menafsirkan kedalam konteks seluruh masalah peneliti. Model Miles dan Huberman menggambarkan proses analisis data penelitian kualitatif sebagai berikut :



Gambar 1. Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles dan Huberman

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berulan-bulan sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada awal penelitian melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/objek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi (Sugiyono, 2019)

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data meliputi meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus dengan cara seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas. Dalam hal reduksi data, peneliti melakukan pencatatan hasil di lapangan untuk memilah dan memilih data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan cara melakukan penyederhanaan data hasil penelitian dengan tujuan agar lebih mudah dipahami.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan yang berguna untuk peneliti memahami gambaran dari penelitian. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami tersebut. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

4. Penarikan atau Verifikasi Penyimpulan data

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara memikir ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

3.7 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Penelitian Kualitatif

Dalam pengujian keabsahan data pada metode penelitian kualitatif dilakukan uji kredibilitas. Kredibilitas penelitian kualitatif adalah keberhasilan mencapai maksud mengeksplorasi masalah yang majemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data penelitian. Upaya untuk menjaga kredibilitas dalam penelitian adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut (Sugiyono, 2019) :

1. Perpanjangan pengamatan peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan mengetahui kebenaran data yang telah diperoleh maupun untuk menemukan data-data baru.
2. Meningkatkan ketekunan melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan tersebut, peneliti akan melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau tidak.
3. Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dengan demikian terdapat trianggulasi sumber, trianggulasi pengumpulan data dan trianggulasi waktu.

4. Analisis kasus negatif peneliti mencari data yang berbeda atau yang bertentangan dengan temuan data sebelumnya. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.
5. Menggunakan Bahan Referensi, yaitu adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh data hasil wawancara harus didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data yang berkaitan dengan interaksi manusia atau yang menggambarkan suatu keadaan harus disertakan dengan foto.
6. Mengadakan *member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data, berarti data tersebut sudah valid, semakin kredibel atau dipercaya. Apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data. Tujuan *member check* agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian dan analisa tentang efektivitas kebijakan kartu Prakerja periode 2021 dengan studi pencari kerja, pekerja dan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kota Bandar Lampung yang sudah penulis lakukan, penulis memberikan kesimpulan dan saran antara lain :

1. Program kartu Prakerja merupakan program yang dibuat oleh pemerintah pusat yang direalisasikan pada tahun 2020. Program ini dilaksanakan di seluruh daerah yang ada di Indonesia termasuk di Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan Program kartu Prakerja di Kota Bandar Lampung dapat disimpulkan belum terlaksana secara efektif. Hal ini sesuai dengan analisis dari keempat indikator ukuran mengenai efektivitas program yaitu ketepatan sasaran program yang belum sepenuhnya tepat sebab masih terdapat pekerja yang memperoleh kartu Prakerja sedangkan justru perkerja ter-PHK banyak yang tidak mendapatkan manfaat kartu Prakerja, sosialisasi program Prakerja yang masih minim sebab kurangnya peran pemerintah daerah, tujuan program yang sepenuhnya belum tercapai dan tidak adanya pemantauan program secara langsung sebab semua dilaksanakan secara online tanpa melibatkan peran pemma khususnya Dinas Tenaga Kerja.
2. Beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program kartu pra kerja di Kota Bandar Lampung ada 2 faktor yaitu faktor yang pertama merupakan kurang maksimalnya pengelolaan sistem yang dilakukan oleh pemerintah pusat dimana sistem pendaftaran hingga penyaringan dikelola oleh pemerintah pusat sendiri dan faktor yang kedua ialah pelatihan hanya melalui online dimana maksudnya ialah pelatihan pengembangan kompetensi hanya dilakukan oleh *platform-platform* digital yang disediakan dan tidak adanya pelatihan offline dimana banyaknya

penerima manfaat program ini tidak memanfaatkan dengan baik serta kebijakan pembatasan kegiatan diluar rumah yang membuat penerima pelatihan program kartu Prakerja sulit mendapat lapangan pekerjaan maupun membuka kegiatan usaha di tengah pandemi Covid-19.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tentang efektivitas kebijakan kartu Prakerja periode 2021 dengan studi pencari kerja, pekerja dan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kota Bandar Lampung yang sudah penulis lakukan, penulis memberikan saran untuk menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program kartu pra kerja di Kota Bandar Lampung adalah Sebaiknya pemerintah pusat meninjau kembali terkait bagaimana sistem Program Kartu Prakerja seperti memperbaiki sistem dimana sistem dalam penyaringan yang dibuat terkait penerima manfaat program kartu pra kerja tersebut, sehingga tidak ada kesalahan atau tidak tepatnya sasaran program kartu pra kerja dan sebaiknya pemerintah menyediakan pelatihan secara tatap muka tanpa mengesampingkan protokol kesehatan yang berlaku dan pelatihan yang diselenggarakan disesuaikan dengan latar belakang pendidikan serta keahlian bagi penerima manfaat program kartu pra kerja khususnya di Kota Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Sanusi. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, S. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta :Bumi Aksara.
- Budiani, N. W. (2007). *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*. Jurnal Ekonomi Sosial Vol. 2 No. 1
- Bungin, Burhan. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sawir, Muhammad. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik : Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta : Deepublish
- Moleong, Lexy. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja.
- Mankiw, N.G. (2000). *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Nugroho, Riant. (2017). *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gramedia
- Septiana, Anis Ribcalia, et. al. (2023). *Kebijakan Publik:Teori, Formulasi Dan Aplikasi*. Cetakan Ke-1. Padang : PT. Global Eksekutif Teknologi
- Situmorang. (2016). *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Cetakan Ke-1. Depok : SSDI
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- Sukirno, Sadono. (2013). *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Jakarta : Penerbit PT. Raja. Grafindo Persada.
- Uddin B. Sore Dan Sobirin. (2017). *Kebijakan Publik*. Cetakan Ke-1. Makasar: CV. Sah Media
- Usman, Husaini. (2020). *Metedologi Penelitian Sosial*. Edisi Ke-2. Jakarta : Bumi Aksara.

B. Jurnal

- Anelia Meilani L.G. (2021). *Program Kartu Prakerja dalam Pemenuhan Hak Tenaga Kerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Coronavirus Disease 2019 (Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia)*. 2019, 1–81.
- Bachtiar, P. P., Bima, L., Andrina, M., Warda, N., & Yusrina, A. (2020). *Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19: Asesmen Cepat Dari Sudut Pandang Peserta Program*. *Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 93–100. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15479>
- Barany, L. J., Simanjuntak, I., Widia, D. A., & Damuri, Y. R. Barany, L. J., Simanjuntak, I., Widia, D. A., & Damuri, Y. R. (2020). *Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjangkau Sesuai Sasaran?*. *CSIS Commentaries*, 1-11.
- Budiani, Ni. Wayan. (2007). *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*. *Jurnal Ekonomi Sosial*, 2 (1). <http://ojs.unud.ac.id/index.php/input/article/viewFile/3191/228>
- Consuello, Y. (2020). *Analisis Efektifitas Kartu Pra-kerja di Tengah Pandemi Covid-19*. *Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 93–100. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15479>
- Eka Novia Herdiany, Rahma Elsa Fitriani, Mardhiyya Azhari, Wahyu Nusantara Illahi.S, Al-Amin, Febrina Adita Putri. (2023). *Pengaruh Program Kartu Prakerja Pasca Pandemi Covid 19 terhadap Pendapatan dan Manfaat Jangka Panjang Bagi Rumah Tangga di Kota Payakumbuh*. *Journal on Education*, 5(2), 4226-4234. <http://jonedu.org/index.php/joe>
- Franita, R. (2016). *Analisa Pengangguran Di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(12), 88–93. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/viewFile/97/97>
- Memah, N. I., Rares, J., & Waleleng, G. (2022). *Efektivitas Program Kartu Prakerja Era Pandemi Covid – 19 Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan), Sosial Dan Ekonomi* , 18(1), 247–254.
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). *Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia*. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>
- Rawie, Y., & Samputra, P. L. (2020). *Analisis Cost and Effectivity Program Kartu Prakerja di Indonesia*. *Journal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 118–139.

<https://journal.uny.ac.id/files/journals/22/articles/32430/submission/review/32430-85288-1-RV.pdf>

Wijayanti, R. I., & Humardhiana, A. (2020). *Optimalisasi Program Kartu Prakerja Dengan Pelatihan Branding Strategy*. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 109. <https://doi.org/10.24235/dimasejati.v2i1.6645>

C. Literatur online

<https://bandarlampungkota.bps.go.id>

<https://dipb.kemenkeu.go.id/>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200413130936-92-493002/coronatotal-pekerja-kena-phk-dan-dirumahkan>.

<https://www.prakerja.go.id>

<https://www.voaindonesia.com/a/survei-smrc-77-warga-menilai-corona-ancampenghasilan/5376217.html>

D. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

UUD Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan